



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pusat Informasi Pengawasan



Laporan Kinerja Pusinfowas **2018**

Nomor: **LKIN-O40/IP/3/2019**

Tanggal: 10 Januari 2019

KATA PENGANTAR

Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) sebagai salah satu unit pendukung yang bertanggung jawab menyediakan sistem yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan maupun *stakeholder* BPKP. Penyediaan sistem informasi tersebut akan direalisasikan secara bertahap hingga kesenjangan antara kebutuhan informasi dan informasi yang tersedia dapat berkurang. Sesuai dengan *Enterprise Architecture* sistem Informasi BPKP, kebutuhan informasi tersebut, terutama informasi pengawasan direalisasikan melalui pembangunan Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) yang terdiri dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atau dikenal dengan sistem RENLAKPOR, serta sistem pengawasan K/L/D/BU/Investigasi. Sistem ini sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2015 dan sejak tahun 2017 sistem tersebut sudah diimplementasikan di seluruh unit pengawasan BPKP.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Pusinfowas dapat melewati tahun anggaran 2018 dan menyelesaikan berbagai target kinerja yang telah direncanakan. Sebagai bagian dari rasa syukur serta perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategi, Pusat Informasi Pengawasan telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

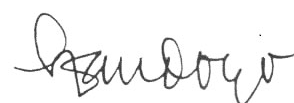
Laporan Kinerja ini membandingkan antara Realisasi Kinerja Pusinfowas tahun 2018 dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) Pusinfowas Tahun 2018 dengan indikator pengukuran melalui *output* dan *outcome*, serta evaluasi dan analisis untuk sasaran program yang mencakup pula pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Hasil capaian kinerja BPKP bisa dilihat dari pencapaian *output* dan *outcome*, dengan rincian:

1. Pelayanan Data dan Teknologi Informasi, Tingkat Pemakaian Sistem Informasi yang Terotomatisasi capaian *outcome* sebesar 72,5% dari target 72,5% atau 100%.
2. Sasaran kegiatan jumlah paket penyajian informasi terkait Nawacita capaian *output* sebanyak 4 paket dari target 4 paket atau 100%.
3. Sasaran kegiatan jumlah Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Yang mendukung Nawacita capaian *output* sebanyak 1 kegiatan dari target 1 kegiatan atau 100%
4. Sasaran kegiatan jumlah Sistem informasi manajemen akuntabilitas (SIMA) yang terotomatisasi capaian *output* sebanyak 1 sistem dari target 1 sistem atau 100%

Laporan Kinerja tahun 2018 ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan kinerja Pusinfowas dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan BPKP yang diantaranya melalui peningkatan kapasitas *Information and Communication Technology (ICT)* menuju tercapainya visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Pusinfowas



Tri Handoyo

NIP 19650422 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi	1
C. Kegiatan dan Produk Organisasi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis 2015-2019.....	6
1. Pernyataan Visi BPKP	6
2. Pernyataan Misi BPKP	6
3. Tujuan	7
4. Indikator Kinerja Program	7
5. Program dan Kegiatan.....	8
B. Perjanjian Kinerja 2018.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Akuntabilitas Keuangan	19
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusinfowas tahun 2018 melaporkan capaian kinerja sampai tahun 2018, yang diharapkan dapat menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung capaian kinerja serta tugas pokok dan fungsi BPKP.

Sebagai unit dukungan, Pusinfowas telah menetapkan visi yang sepenuhnya mengacu pada Visi BPKP, yaitu: **Mewujudkan Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.**

Dalam mendukung tercapainya visi tersebut, Pusinfowas memosisikan diri menjadi "*Center of Knowledges*", sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hal tersebut bermakna bahwa Pusinfowas sebagai unit pendukung di bidang sistem informasi berkewajiban menyelenggarakan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan Pemerintah/Presiden dan internal BPKP, yang dalam hal ini adalah keputusan terkait dengan peran BPKP sebagai internal auditor. Untuk itu Pusinfowas harus mampu mengelola informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk dapat dikomunikasikan kepada Presiden dan Pimpinan Pemerintahan Lainnya.

Sasaran program yang akan dicapai adalah melalui Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi dengan indikator tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi dengan target indikator sasaran sebesar 72,5%. Target IKU tersebut dapat dicapai dengan tingkat pemakaian sebesar 72,5% atau 100% dari target. Pencapaian ini ditandai dengan dimanfaatkannya Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) oleh semua user terkait, meskipun masih ditemui adanya *bugs* minor pada sistem. SIMA telah dipergunakan secara penuh

oleh BPKP sejak tahun 2017 untuk perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan. Selain itu Pusinfowas telah menyajikan informasi hasil pengawasan terkait nawacita melalui penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Berkala BPKP ke Presiden yang disajikan ke dalam empat fokus pengawasan.

Faktor pendorong capaian IKU tersebut berasal dari komitmen pimpinan BPKP serta dukungan dari seluruh Direktur/Kepala Perwakilan dan Kasubdit/Korwas. Tidak ketinggalan dukungan pemanfaatan SIMA oleh seluruh user terkait dan adanya forum diskusi untuk menyelesaikan *bugs*/permasalahan yang dihadapi juga merupakan faktor yang ikut mendorong pencapaian IKU.

Beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah ke depan bagi Pusinfowas antara lain sebagai berikut:

- Sampai dengan saat ini masih terdapat *bugs* pada aplikasi SIMA dan harus dilakukan perbaikan.
- Memenuhi kebutuhan *user* terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang belum masuk di SIMA.
- Peningkatan ketertiban *inputing* data dari sumber data baik pusat maupun perwakilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon II BPKP yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pusinfowas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusinfowas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi;
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis data;
3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan;
4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha.

B. Aspek Strategis Organisasi

Pusinfowas merupakan satuan kerja mandiri yang berada di bawah Kepala BPKP. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPKP tersebut secara lebih efisien dan efektif, Pusinfowas berperan dalam :

1. Penyediaan data dan informasi pengawasan untuk disampaikan kepada stakeholder BPKP
2. Pembangunan dan penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka otomatisasi proses bisnis pengawasan BPKP
3. Pembangunan sistem informasi pendukung untuk keperluan internal manajemen BPKP.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program BPKP tersebut terdiri dari:

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01).

Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas adalah kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi

pemerintahan dalam hal ini adalah lingkup pelayanan internal BPKP. Dalam Renstra Pusinfowas 2015-2019 program yang dijalankan adalah berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP;
2. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam rangka mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
 - a. Pembinaan Administrasi Manajemen dan Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP
 - b. Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
 - c. Pengadaan dan Penyaluran sarana dan Prasarana BPKP
2. Kegiatan yang berada pada Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah: Penyelenggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Pemerintah/Presiden dan Internal BPKP.

Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan pemerintah maupun internal BPKP yang dilakukan oleh Pusinfowas untuk mendukung pelaksanaan tugas BPKP telah dirancang dalam *Enterprise Architecture* (EA BPKP). EA tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kinerja Pusinfowas tiap tahunnya yang menyangkut seluruh komponen sistem informasi yaitu infrastruktur, SDM, data/informasi, dan prosedur/kebijakan.

Tahun 2018 Fokus kegiatan Pusinfowas adalah masih dalam rangka mengimplementasikan hasil pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA 4.0) , ke seluruh unit kerja pengawasan BPKP dan melakukan pengumpulan data eksternal untuk meningkatkan pemanfaatan terhadap SIMA.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Pusinfowas mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari dua bidang, lima subbidang, satu subbagian tatausaha, dan jabatan fungsional sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi pada gambar di bawah.

Gambar 1.1



Masing-masing Bidang dan Sub Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

1. **Bidang Pengelolaan Data dan Informasi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan, serta penyelenggaraan administrasi basis data.
2. **Bidang Pengembangan Sistem Informasi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi, teknologi informasi, dan pemberian dukungan kepada pengguna.
3. **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

4. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Sistematika Penyajian

Dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusinfowas tahun 2018 ini, digunakan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi antara lain tugas pokok dan fungsi Pusinfowas, aspek strategis Pusinfowas, produk dan Jasa yang dihasilkan dan struktur organisasi Pusinfowas.
- Bab II Perencanaan Kinerja berisi rencana strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2018.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran
- Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis Pusinfowas Tahun 2015-2019 dirumuskan dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra tersebut telah berpedoman pada Renstra BPKP 2015-2019. Berikut akan diuraikan rencana strategis dan kontrak kinerja Pusinfowas tahun 2018.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Visi dan Misi Pusinfowas mengacu sepenuhnya kepada visi dan misi BPKP yang tertuang dalam Rencana Strategik BPKP tahun 2015-2019.

1. Pernyataan Visi BPKP

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

2. Pernyataan Misi BPKP

Dengan kesepakatan visi di atas, terbentang suatu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh BPKP. Tantangan tersebut dijabarkan lebih lanjut agar mendekati kenyataan yang mungkin dapat dicapai. Untuk itu ditetapkan pernyataan misi sebagai berikut:

Misi satu: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih-dan efektif;

Misi Dua: Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif;

Misi Tiga: Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

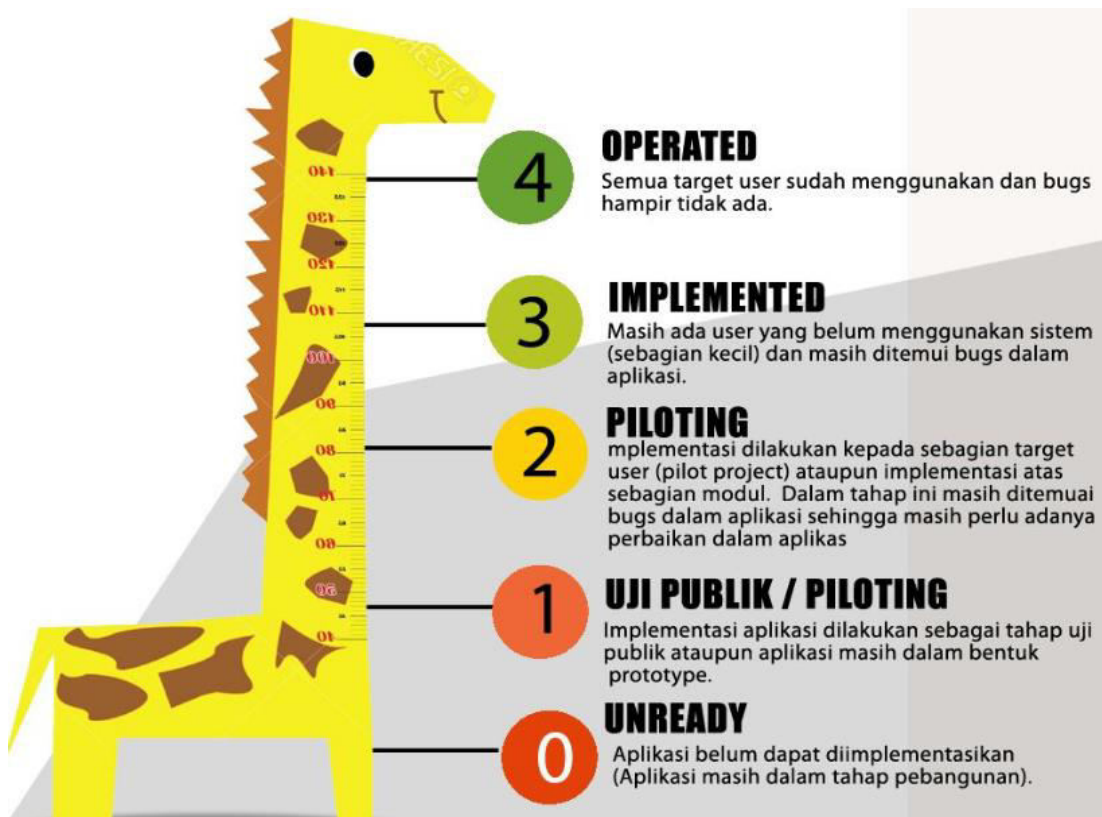
3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan.

4. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Pusinfowas tahun 2015-2019 adalah “Tingkat Pemakaian Informasi yang Terotomatisasi”. Indikator ini diukur menggunakan tingkat kematangan sistem informasi sebagaimana tampak pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Tingkatan Kematangan Implementasi Sistem Informasi



Tingkatan implementasi tersebut diterapkan pada target sistem informasi utama yang akan dikembangkan dan diimplementasikan selama tahun 2015-2019. Target tingkat kematangan implementasi sistem informasi yang akan dicapai tahun 2019 adalah tingkat *operated* (4) dengan rata-rata capaian tingkat kematangan 90% atau dengan kata lain diharapkan semua target sistem diimplementasikan oleh semua *user* dan tidak ditemukan *bugs* dalam operasionalisasinya. Hal ini menjadi dasar bagi Pusinfowas untuk menentukan kegiatan yang akan diambil agar indikator kinerja tersebut dapat tercapai.

5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan sasaran program sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Pusat Informasi Pengawasan Nomor 370 Tahun 2016 tanggal 6 Mei 2016 tentang Renstra Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2015-2019, telah

ditetapkan satu program dan tiga kegiatan sebagaimana tersaji pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Program dan Kegiatan Pusinfowas Tahun 2018



B. Perjanjian Kinerja 2018

Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dari Kepala BPKP kepada Kepala Pusat Informasi Pengawasan tahun 2018, dinyatakan kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai oleh Pusinfowas sebagaimana terlihat pada tabel 2.1. Dokumen ini untuk menilai kinerja Pusinfowas tahun 2018.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pusinfowas Tahun 2018

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
A. Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		
1.	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	1.1 Tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi	%	72,50
B. Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		
1.	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	1.1 Jumlah Paket Penyajian Informasi Terkait	paket	4
		1.2 Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem	kegiatan	1
		1.3 Jumlah Sistem Informasi Manajemen	sistem	1
Kegiatan		Anggaran		
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp.	10,246,271,000	
2.	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	Rp.	219,839,000	
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengawasan	Rp.	72,896,082,000	
		Rp.	83,362,192,000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Renstra BPKP 2015 - 2019 yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra Pusinfowas, Pusinfowas bertanggung jawab atas pencapaian sasaran program “Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi”. Selain itu, Pusinfowas juga mendukung ketercapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP” melalui pelaksanaan salah satu kegiatannya.

Indikator kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Kinerja				%
		Target		Realisasi		
1.	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi					
	Tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi	72,5	%	72,5	%	100
	1) Jumlah paket penyajian informasi terkait Nawacita	4	Paket	4	Paket	100
	2) Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Yang mendukung Nawacita	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
	3) Jumlah Sistem informasi manajemen akuntabilitas (SIMA) yang terotomatisasi	1	sistem	1	sistem	100

Dari data pada tabel 3.1, secara umum Pusinfowas dapat melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya ditandai dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dan mendekati capaian kinerja program yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian kinerja output tersebut telah mendorong capaian kinerja program sebesar 100%. Capaian kinerja output Pusinfowas tahun 2018 tercapai kinerja 100%.



Sasaran Program

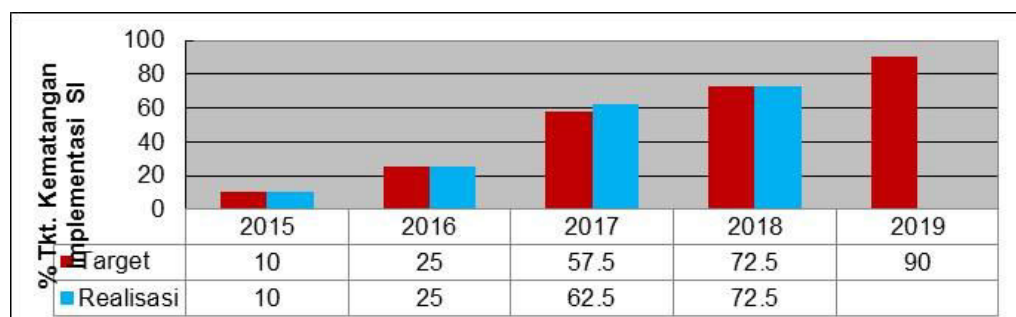
Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

Sebagai lembaga pengawasan instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP membutuhkan data dan informasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Data dan informasi yang ada selama ini belum tertata dengan baik. Setiap unit kerja menyimpan dan mengelola sendiri data/informasinya dan aplikasi yang ada belum terintegrasi sehingga bila ada data/informasi pengawasan dibutuhkan akan membutuhkan waktu untuk mendapatkannya. Awal tahun 2017 hadirlah Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) dengan tujuan menata informasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan yang lebih berkualitas yang dapat memberikan masukan strategis bagi *stakeholder* BPKP. Sistem ini sudah siap diimplementasikan tahun 2017 setelah melalui tahap analisis dan pengembangan sejak tahun 2015.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat periode Renstra 2015-2019. Tahun ini seluruh kegiatan difokuskan untuk mewujudkan penataan informasi tersebut melalui implementasi SIMA.

Target dan capaian indikator kinerja Sasaran Program Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi dari tahun 2015 s.d. 2019 disajikan pada grafik 3.1.

Grafik 3.1
Perkembangan Target dan Realisasi Sasaran Program
Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
Periode 2015–2019



Angka capaian indikator kinerja sasaran program tersebut diperoleh dari pengukuran tingkat kematangan implementasi sistem informasi di lingkungan BPKP sebagaimana dilihat pada gambar 2.1.

Nilai capaian IKU tahun 2015 s.d. 2018 dengan menerapkan metode penilaian tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi atas target sistem informasi dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Informasi BPKP
Tahun 2018

Sistem Yg Diotomatisasi	Target					Realisasi			
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018
SIMA Pelaporan	0	1	2	3	4	0	1	3	3
SIMA Perencanaan	1	1	3	4	4	1	1	3	3
SIMA Pengawasan K/L/P/BU	0	1	2	2	2	0	1	3	3
SIMA Pengawasan Investigasi	1	1	2	3	4	1	1	3	3
SIMA IACM	1	2	3	3	4	1	2	3	3
Dashboard pimpinan	0	1	2	2	4	0	1	2	2
E-Review	0	0	1	2	2	0	0	0	2
KMS	0	0	1	2	4	0	0	3	3
WBS	1	2	4	4	4	1	2	4	4
Sistem Management Asset TI	0	1	3	4	4	0	1	1	3
Rata-Rata tingkat Kedewasaan (a)	0,4	1	2	3	3,6	0,4	1	2,5	2,9
Prosentase Posisi Tingkat Kedewasaan dibandingkan dengan tingkat Kedewasaan tertinggi (a/4) * 100	10	25	57,5	72,5	90,0	10	25	62,5	72,5

Berdasarkan Grafik 3.1 dan Tabel 3.2 terlihat bahwa capaian indikator program **mencapai/sama dengan** target yaitu **100**, dengan rata-rata tingkat kematangan implementasi sistem berada pada level "2,9". Pencapaian ini ditandai dengan dimanfaatkannya SIMA oleh semua *user* terkait, meskipun masih ditemui adanya *bugs* minor pada sistem. Capaian ini sesuai perencanaan awal, tahun 2018 dimana SIMA direncanakan sudah diimplementasikan ke sebagian besar *user* saja dan menuju tingkat kematangan **operated**. Tercapainya target indikator program ini disebabkan karena sistem yang sudah dibangun sudah diimplementasi ataupun masih berupa *piloting* di sebagian lokasi *user*.

Bila dibandingkan dengan target indikator kinerja program (IKP) akhir periode Renstra tahun 2019 sebesar 90%, capaian IKP tahun 2018 sudah mencapai 80,56%. Sedangkan dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 62,5%, capaian akhir tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 10%. Grafik 3.2 memperlihatkan capaian IKP tahun 2018 dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

Grafik 3.2
Perkembangan Capaian IKP
Tingkat Pemakaian Sistem Informasi Yang Terotomatisasi



Faktor pendorong capaian IKU tersebut berasal dari:

- Komitmen pimpinan BPKP dan monitoring secara berkelanjutan.
- Dukungan Direktur dan Kepala Perwakilan serta Kasubdit/Korwas selaku Admin SIMA.
- SIMA dimanfaatkan oleh sebagian besar *user* terkait, meskipun kadang-kadang masih ditemui adanya *bugs* dan peningkatan minor pada sistem dan perilaku para pengguna yang masih mengandalkan operator.
- Forum diskusi dan penyelesaian permasalahan yang intensif.
- Pelaksanaan pengembangan SIMA sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari bidang Pengembangan Sistem Informasi.

Capaian kinerja *outcome* hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan yang mendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut beserta indikator kinerja *output*-nya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Output Tahun 2018

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah paket penyajian informasi terkait Nawacita	Paket	4	4	100
2	Jumlah layanan pengelolaan sistem informasi pengawasan yang mendukung Nawacita	Kegiatan	1	1	100
3	Jumlah Sistem Informasi manajemen akuntabilitas SIMA yang terotomatisasi	Sistem	1	1	100

Berdasarkan **Tabel 3.3.** dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Pusinfowas mencapai semua target output.

Capaian masing-masing kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah Paket Penyajian Informasi Terkait Nawacita

Penyajian informasi terkait Nawacita terdiri atas penyajian informasi kepada pihak eksternal dan penyajian informasi kepada pihak internal.

Penyajian informasi kepada pihak eksternal yang diukur adalah laporan hasil pengawasan (LHP) berkala BPKP kepada *stakeholder* utama BPKP yaitu Presiden. Laporan Hasil Pengawasan kepada Presiden telah disusun dan diterbitkan secara berkala yaitu setiap semester dan tahunan. Pada tahun 2018, Pusinfowas BPKP telah menyusun dan menyampaikan LHP kepada Presiden sebanyak 2 kali yaitu Tahun 2017 (diterbitkan pada bulan Januari Tahun 2018) dan periode Semester 1 Tahun 2018.

Dalam rangka menjalankan amanah yang diberikan untuk menjalankan tugas dan fungsi BPKP, kegiatan pengawasan BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam LHP ke Presiden kegiatan pengawasan BPKP disajikan dalam empat fokus pengawasan sebagai berikut:

- Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional,
- Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal,
- Pengamanan Aset Negara, dan
- Peningkatan *Governance System*.

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan kepada Presiden tetap dikoordinasikan oleh Pusinfowas dengan melibatkan seluruh unit kerja BPKP Pusat. Untuk meningkatkan kualitas laporan hasil pengawasan kepada Presiden, pada tahun 2018 dilakukan penyusunan Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Berkala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan yang merupakan pengganti Perka BPKP No. 1511 tahun 2011 tentang Standar Format, Substansi, Prosedur Penyusunan LHP Berkala kepada Pihak Eksternal. Penggantian Perka tersebut dilakukan untuk menyesuaikan konten laporan kepada pihak eksternal sesuai dengan kebutuhan saat ini. *Draft* Perka tersebut saat ini dalam tahap kompilasi masukan dari para Deputi Kepala BPKP yang selanjutnya akan diajukan kepada Biro Hukum untuk mendapatkan *legal drafting* sebelum mendapatkan persetujuan Kepala BPKP.

Penyajian informasi kepada pihak internal yang diukur dari indikator ini adalah kegiatan penyiapan dukungan data untuk Rendal/Kedeputian terkait saldo Temuan Pemeriksaan yang Belum Ditindaklanjuti (TPB) per Kementerian/Lembaga yang dilakukan setiap semester sebagai dukungan data untuk monitoring dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Untuk tahun 2018, kegiatan penyiapan dukungan data saldo TPB per Kementerian/Lembaga dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Januari dan Agustus. Selain penyiapan dukungan data saldo TPB kepada Rendal/Kedeputian, dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Pusinfowas pada tahun 2018 telah mengadakan kegiatan sebagai berikut:

- Penyiapan dukungan data untuk Rendal terkait saldo TPB per 31 Desember 2017 per K/L.
- Pemutakhiran TL Hasil Pengawasan BPKP pada Kemenhub s.d 31 Desember 2017.

- Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan.

b. Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Yang mendukung Nawacita

Kepercayaan pengguna TI terhadap kinerja unit TI diukur dari tingkat layanan yang diberikan oleh unit TI. Target satu kegiatan untuk kinerja output dari indikator kegiatan layanan TI merupakan ukuran untuk layanan ketersediaan infrastruktur TI yang dapat melayani lalu lintas data untuk mendukung tugas pokok BPKP. Selama tahun 2018 tingkat layanan berupa satu kegiatan dapat dicapai dengan tingkat ketersediaan layanan akses jaringan yang masih berada pada batas toleransi dengan jumlah jam layanan sebanyak 8.554 jam (118%) dari total jam layanan minimum yang dapat ditoleransi dalam satu tahun sebesar 7.200 jam atau 20 jam dalam 1 hari.

Untuk mendukung pelaksanaan output kegiatan ini, Pusinfowas telah melakukan monitoring dan evaluasi kondisi jaringan kantor perwakilan BPKP seluruh Indonesia termasuk membantu perbaikan permasalahan jaringan di beberapa Perwakilan BPKP. Beberapa permasalahan yang terjadi dan sudah diselesaikan di tahun 2018 terkait dengan layanan infrastruktur TI BPKP meliputi:

- Pemeliharaan perangkat jaringan berupa penggantian *switch* maupun *router* yang diidentifikasi rusak di perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan Sulawesi Tenggara;
- Pemulihan koneksi VPN-IP BPKP (WAN) dan internet di Perwakilan-perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah yang terdampak bencana gempa bumi serta Nanggroe Aceh Darussalam yang teridentifikasi mengalami gangguan instabilitas koneksi (*intermittent*);
- Pembenahan infrastruktur LAN pada Perwakilan-perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah yang kondisinya membutuhkan perbaikan, perapian, dan pemasangan ulang infrastruktur LAN meliputi *router*, *switch* serta *cabling*.

c. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) yang Terotomatisasi

Target otomatisasi SIMA tahun 2018 sebanyak satu sistem SIMA yang diimplementasikan. Kegiatan otomatisasi SIMA tahun 2018 terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu implementasi SIMA, *data gathering*, dan penyempurnaan dashboard SIMA.

1) Implementasi SIMA

Memasuki tahun kedua implementasi SIMA, masih ditemui *bugs* pada beberapa proses SIMA yaitu proses revisi KAP, proses reuiu surat tugas sampai pemberian nomor dan proses pembuatan laporan. Sebagian *bugs* sudah bisa diselesaikan akar permasalahannya namun masih ada beberapa *bugs* yang belum dapat diidentifikasi akar permasalahannya sampai dengan akhir tahun 2018 sehingga masih terjadi. Penyelesaian yang dilakukan saat ini masih bersifat sementara yaitu dengan memperbaiki data langsung pada basis data.

2) *Re-Engineering Dashboard*

Kegiatan *re-engineering dashboard* dilakukan untuk meningkatkan manfaat *dashboard* BPKP agar dapat mendukung pengambilan keputusan strategis atau menyediakan rekomendasi strategis berdasarkan laporan-laporan hasil pengawasan. Selama ini *dashboard* BPKP menyediakan berbagai macam informasi yang tidak terintegrasi dan belum bisa digunakan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis, informasi yang adapun masih bersifat operasional. Sampai akhir tahun 2018, kegiatan ini belum dapat diselesaikan dan diluncurkan tahun 2019 karena kontrak baru ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2018.

3) *Gathering Data Eksternal*

Kegiatan *Gathering Data Eksternal* BPKP dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan SIMA dari sisi ketersediaan data eksternal. Ketersediaan data eksternal tersebut dipenuhi dengan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari beberapa struktur kebutuhan data eksternal yang dibutuhkan BPKP, 40% sudah diperoleh dari BPS sedangkan yang lainnya dipenuhi dengan membuka hubungan kerjasama dengan

kementerian/lembaga diantaranya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4) Pengadaan Infrastruktur SIMA

Pada tahun 2018 untuk sub kegiatan infrastruktur pendukung SIMA, telah diadakan peralatan perangkat *situation room* dan *Video Conference* yang merupakan luncheon kegiatan tahun 2017, perangkat *wireless access* kantor pusat, *firewall system*, *data processing devices*, *back-up system*, dan *IP Telephony System*. Semua kegiatan pengadaan sudah dicapai kecuali pengadaan *IP Telephony System* yang akan diluncurkan ke tahun anggaran 2019 karena adanya keterlambatan penyelesaian produk dari pihak principal (CISCO).

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran untuk melaksanakan indikator kinerja terimplementasinya sistem informasi yang terotomatisasi sebesar Rp65.685.915.417,00 atau 90,11% dari anggaran Rp72,896,082,000,00. Dari nilai anggaran sebesar Rp72,896,082,000,00, sebesar Rp63.284.082.000,00 (86,81%) merupakan anggaran belanja yang didanai dari pinjaman luar negeri (*loan*) ADB STAR Project. Dari anggaran Rp63.284.082.000,00 yang didanai dari *loan*, senilai Rp60.149.364.000,00 (95,05%) merupakan belanja modal.

Dari penyerapan anggaran di atas masih ada dana *loan* yang akan diluncurkan ke Tahun Anggaran 2019 yaitu:

- Paket pengadaan SIMA *Infrastructure to Support SIMA 4.0 (Updated IP Telephony System)*, sebagian pembayaran dan pekerjaannya diluncurkan ke tahun 2019. Paket pekerjaan tersebut, kontraknya baru ditandatangani bulan September 2018 dan karena adanya keterlambatan penyelesaian produk dan pengiriman dari pihak *principal* dalam hal ini CISCO maka dilakukan *addendum* waktu penyelesaian kontrak dari semula jangka waktu sampai dengan 26 Desember 2018 diperpanjang menjadi 24 Januari 2019.

- Kontrak konsultan *Reengineering Dashboard SIMA*, sebagian pekerjaan dan pembayaran termin 2 dan 3 diluncurkan ke 2019. Kontrak konsultan ini baru ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2018 dan pekerjaan sesuai dengan kontrak akan dilakukan sampai dengan tanggal 15 Maret 2019.
- Dari sisa anggaran *training* dan belanja modal yang tidak terserap, di tahun 2018 diajukan revisi ke dalam anggaran *training* luar negeri sebesar Rp2.395.495.000,00 yang pelaksanaannya akan dilakukan di bulan Februari 2019.

Dari sisi penggunaan dana sebesar Rp65.685.915.417,00, IKP tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi untuk mendukung Nawacita telah menggunakan dana secara efisien dan efektif. Kondisi ini terlihat dari capaian IKP sebesar 100% dari target dengan capaian penggunaan dana diluar pengadaan perangkat sebesar 77,43%. Anggaran belanja modal yang dilaksanakan tahun 2018 dan belum terserap tidak mempengaruhi capaian indikator kinerja program tahun 2018 karena akan mendukung capaian kinerja BPKP jangka panjang terutama sampai tahun 2019.

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai tahun 2018 sebanyak 12.643 OH atau 100,37% dari rencana setahun sebanyak 12.596 OH. Realisasi penggunaan hari produktif dan rincian penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2018 disajikan pada lampiran.

BAB IV PENUTUP

Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) sebagai salah satu unit pendukung di bidang sistem informasi berkewajiban menyelenggarakan sistem dukungan proses pengelolaan data (*data processing*) dan penyusunan laporan hasil pengawasan (*reporting process*). Dalam melaksanakan tugasnya Pusinfowas mengalami banyak kendala dalam penataan informasi terutama informasi hasil pengawasan. Penataan informasi tersebut merupakan salah satu upaya BPKP meningkatkan kualitas outputnya yang dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah penyelenggaraan pemerintahan. Tahun 2016 telah selesai dikembangkan SIMA 4.0. sebagai salah satu solusi penataan informasi pengawasan BPKP tersebut. Sistem ini telah diimplementasikan 54 unit kerja pengawasan eselon II. Tingkat kematangan sistem informasi harus terus dimonitoring dan mendapat dukungan dari unit-unit kerja terkait selaku pengguna. Adanya suatu “*enforcement*” dari pimpinan atas penggunaan aplikasi SIMA 4.0 baik dalam bentuk Peraturan dan SOP akan lebih memastikan peningkatan tingkat kematangan SIMA 4.0 sebagai suatu aplikasi yang memberikan dukungan peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pengambilan keputusan yang memberikan nilai tambah oleh pimpinan.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja 2017, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Pusat Informasi Pengawasan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Pusat Informasi Pengawasan dalam mendukung capaian kinerja serta tugas pokok dan fungsi BPKP dapat terwujud.

KINERJA SASARAN PROGRAM DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2018
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan (Rp000)			SDM (OH)			Penggunaan Dana	Penggunaan SDM/OH
							Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%	Rencana	Realisasi	%	Efisien/Tidak Efisien	Efisien/Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	Tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi	%	72,50	72,50	100,00	83.362.192.000	75.981.188.106	91,15	12.596	12.643	100,37	Efisien	Efisien

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN *OUTCOME* TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017 DAN TARGET 2019
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian (%)		Naik / (Turun)	Target 2019	% realisasi 2018 dari target 2019
				2017	2018		2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12=6/11*100%
1	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	Tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi	%	62,50	72,50	10,00	109	100	(9,00)	90,00	80,56

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN
TAHUN 2018**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Dana (Rp000)			SDM (OH)		
							Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	Jumlah Paket Penyajian Informasi Terkait Nawacita	paket	4	4	100	612.025	573.901	93,77	3.080	3.052	99,09
		Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Yang Mendukung Nawacita	layanan	1	1	100	8.408.325	8.238.434	97,98	3.680	3.793	103,07
		Jumlah Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) yang Terotomatisasi	sistem	1	1	100	63.875.732	56.873.580	89,04	3.000	2.964	98,80
JUMLAH SASARAN KEGIATAN 1				6	6	100	72.896.082	65.685.915	90,11	9.760	9.809	100,50
2	Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan	Layanan Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	12		9.203.918	9.149.610	99,41	1.180	1.182	100,17
		Layanan Kerumahtanggaan	Bulan	12	12		1.042.353	963.204	92,41	948	952	100,42
		Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP	Laporan	1	1		219.839	182.459	83,00	708	700	98,87
JUMLAH SASARAN KEGIATAN DST							10.466.110	10.295.273	98,37	2.836	2.834	99,93
TOTAL							83.362.192	75.981.188	91,15	12.596	12.643	100,37

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun) 7=6-5	Capaian		Naik / (Turun) 10=9-8
				2017	2018		2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
1	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	Jumlah Paket Penyajian Informasi Terkait Nawacita	paket	4	4	-	100%	100%	-
		Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Yang Mendukung Nawacita	layanan	1	1	-	100%	100%	-
		Jumlah Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) yang Terotomatisasi	sistem	1	1	-	100%	100%	-